

BUKHARI

Direktur Pengembangan PT Jateng Petro Energi (Perseroda)

“KESEMPATAN BERUSAHA DAN INVESTASI DI BISNIS HILIR MIGAS OLEH DAERAH PENGHASIL MIGAS / BUMD.”

**Rapat Kerja ADPMET
Manado-Sulawesi Utara, Kamis 9 Juni 2022**



ALUR PEMIKIRAN DAN PEMBAHASAN ;

“KESEMPATAN BERUSAHA DAN INVESTASI DI BISNIS HILIR MIGAS OLEH DAERAH PENGHASIL MIGAS / BUMD”

(1)

- **ALOKASI** Gas
- **PASAR** Gas
- **INFRASTRUKTUR** Gas

(2)

**KESEMPATAN
BERUSAHA
DAN INVESTASI**

(3)

**Dampak +/- ke
Daerah Penghasil
Migas/BUMD**

ALOKASI

PASAR

INFRASTRUKTUR

SERIAL REGULASI HILIR MIGAS; TABEL KOLANGKALING BERWARNA

REGULASI	1. 2009 - 2016 PTK BPMIGAS No.29/2009 Tentang Penunjukan Penjual dan Penjualan Gas Bumi/LNG/LPG Bagian Negara	2. 2016-Sekarang Permen ESDM No. 06/2016 Tentang Ketentuan & Tata Cara Alokasi dan Harga Gas	3. 2022 (Per 17 Januari 2022) RPP Kemenperin RI Tentang Gas Bumi Untuk Kebutuhan Dalam Negeri
ALOKASI GAS			
PASAR GAS			
INFRASTRUKTUR GAS			

 BUMD
  BUMN
  BUMS
  Level keSETARAan
  Trigger

RPP INISIATIF KEMENPERIN; BUMD TIDAK DIBERI PERAN SAMA



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S/6/M-IND/HK/I/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Izin Prakarsa Rancangan
Peraturan Pemerintah tentang Gas Bumi
untuk Kebutuhan Dalam Negeri

Jakarta, 17 Januari 2022

Yth. Menteri Sekretaris Negara

di

Tempat

Pasal 8

- (1) Penyediaan dan penyaluran Gas Bumi dilaksanakan oleh:
 - a. badan usaha milik negara dan/atau afiliasinya yang bergerak di bidang kegiatan usaha Gas Bumi; dan
 - b. perusahaan kawasan industri tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
- (2) Perusahaan kawasan industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat melakukan sendiri penyediaan dan penyaluran Gas Bumi atau dapat bekerja sama dengan badan usaha lainnya.
- (3) Penyediaan dan penyaluran Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

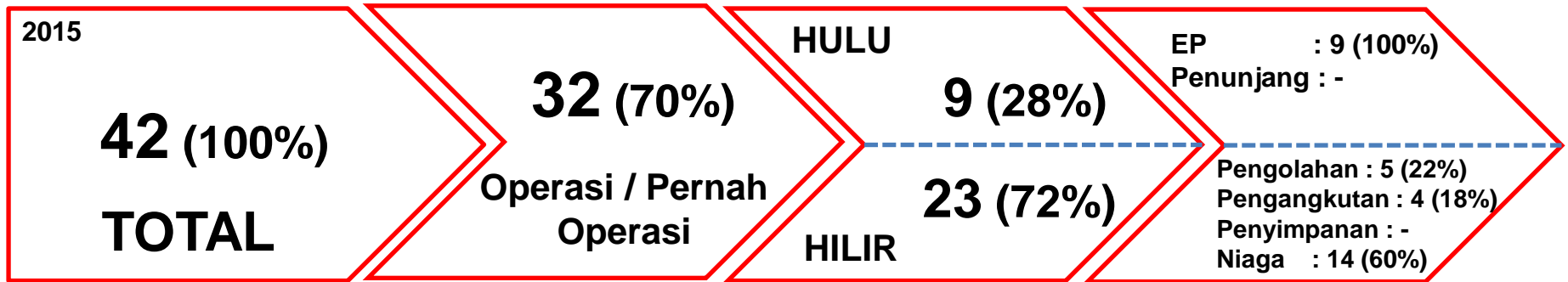
BUMD MIGAS DI INDONESIA

No	Badan Usaha Milik Daerah		Hulu (upstream)		Hilir (downstream)			
	NamaBadan Usaha	Daerah	Eksplorasi&Produksi	Penunjang	Pengolahan	Pengangkutan	Penyimpanan	Niaga
1	PT. Petrogas Jatim Utama	Prov. JawaTimur						●
2	PT. Petrogas Wira Jatim	Prov. JawaTimur	●					
3	PT. Petrogas Jatim Utama Cendana	Prov. JawaTimur	●					
4	PT. Petrogas Jatim Hilir	Prov. JawaTimur						●
5	PT. Gresik Migas	Kab. Gresik						●
6	PT. Gerbang Oil dan Gas Jatim WMO	Kab. Gresik	○					
7	PT. Pasuruan Migas	Kab. Pasuruan						●
8	PT. Sampang Mandiri Perkasa	Kab. Sampang						●
9	PT. Wira Usaha Sumekar	Kab. Sumenep	●					
10	PT. Asri Dharma Sejahtera	Kab. Bojonegoro	●					
11	PT. Bojonegoro Bangun Sarana	Kab. Bojonegoro			○			●
12	PD. Migas	Kab. Tuban						○
13	PT. Bangkalan Petro Gas	Kab. Bangkalan						○
14	PD. Aneka Usaha	Kab. Sidoarjo				●		
15	PT. Sarana Patra Hulu Cepu	Prov. Jawa Tengah	●					
16	PT. Blora Patra Energi	Kab. Blora				●		
17	PT. Blora Patragas Hulu	Kab. Blora	●					
18	PT. Sinergi Patriot Bekasi	Kota Bekasi						○
19	PT. Bina Bangun Wibawa Mukti	Kab. Bekasi			●			
20	PDPDE Sumsel	Prov. Sumatera Selatan	●					
21	PDPDE Gas Sumsel	Prov. Sumatera Selatan			●			
22	PT. EnergiTanjungTiga	Kab. MuaraEnim	●					
23	PD. Pertambangan dan Energi Lahat	Kab. Lahat						●
24	PT. Petro Muba	Kab. MusiBanyuasin						●
25	PD. Petrogas Ogan Ilir	Kab. Ogan Ilir						
26	PT. Wajo Energy Jaya	Kab. Wajo						●
27	PT. Perusda Sulsel	Prov. Sulawesi Selatan			○			
28	PD. Morowali	Kab. Morowali						●
29	PT. Jabar Energi	Prov. Jawa Barat			●			○
30	PT. Prayoga Pertambangan Dan Energi	Kab. Bogor						○
31	PT. Bumi Wiralodra	Kab. Indramayu						●
32	PT. Subang Energi Abadi	Kab. Subang						○
33	PT. Riau Petroleum	Prov. Riau	○		●			
34	PT. Jambi Indoguna Internasional	Prov. Jambi			●			
35	PT. Pembangunan Investasi Riau	Prov. Riau			●			○
36	PT. Bumi Siak Pusako	Kab. Siak	●					
37	PD. Kodya DT II Balikpapan	Kota Balikpapan						●
38	PT. Mandiri Nunukan	Kab. Nunukan						●
39	PT. Jakarta Propertindo	DKI Jakarta			○	●	○	○
40	PT. Pembangunan Batam	Kota Batam						●
41	Perusda Tarakan	Kota Tarakan						●
42	PT. Bontang Migas Dan Energi	Kota Bontang						●

Keterangan : ● Sudah Berjalan
○ Belum Berjalan

Sumber : Diolah dari berbagai Sumber, 12/01/2015

PROFILE BUMD MIGAS DI INDONESIA (Jan 2015)



- Kegiatan BUMD di Hulu Migas dilakukan melalui kepemilikan *Participating Interest* (PI), dalam kegiatan Explorasi & Produksi (EP) baik selaku **Operator** (PT. Bumi Siak Pusako) maupun **Tidak Operator** (Blok Cepu, ONWJ, Mahakam dll).
- Kegiatan BUMD Hilir Migas tersebar di kegiatan Pengolahan, Pengangkutan dan terbesar pada kegiatan **Niaga**, khususnya Niaga Gas Bumi. Peluang ini terjadi karena adanya dukungan regulasi yakni PTK 29 BP Migas (SKK Migas) yang memberikan Alokasi Gas kepada BUMD Daerah Penghasil Migas, **Tanpa Tender**. Misalnya, BUMD Bekasi—**PT BBWM**, berhasil mengelola 40 mmscfd untuk kebutuhan LPG Plant+Niaga Gas serta BUMD Gresik—**PT Gresik Migas**, mengelola s.d 25 mmscfd untuk kegiatan **Niaga Gas Bumi Melalui Pipa dedicated Hilir**. (Periode 2009 – 2015).

ALUR PEMIKIRAN DAN PEMBAHASAN ;

“KESEMPATAN BERUSAHA DAN INVESTASI DI BISNIS HILIR MIGAS OLEH DAERAH PENGHASIL MIGAS / BUMD”

(1)

- **ALOKASI** Gas
- **PASAR** Gas
- **INFRASTRUKTUR** Gas

(2)

**KESEMPATAN
BERUSAHA
DAN INVESTASI**

(3)

**Dampak +/- ke
Daerah Penghasil
Migas/BUMD**

KESEMPATAN USAHA DI HILIR MIGAS ;

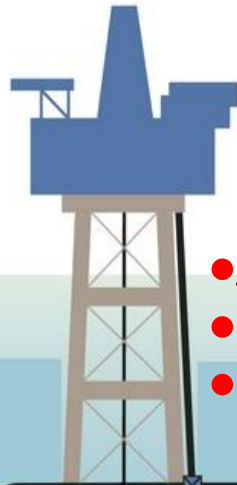
DOWNSTREAM (HILIR MIGAS)

BUSINESS PRODUCT MARKET

- Niaga
- Pengangkutan
- Penyimpanan
- Pengolahan

- Natural Gas (NG)
- CNG
- LNG
- LPG
- Oil
- Etc

- PLN/PJB/IP
- Industri, Komersial
- Transportasi
- Rumah Tangga



UPSTREAM (HULU MIGAS)

- Jasa Penunjang
- Produksi (P)
- Explorasi (E)



NG = Natural Gas, **CNG** = Compressed Natural Gas,
LNG = Liquefied Natural Gas, **LPG** = Liquid Petroleum Gas

POTENSI BISNIS BUMD HILIR MIGAS

POTENSI BISNIS	ESTIMASI INVESTASI	ISUE-ISUE PENTING SAAT INI
A. PENGOLAHAN		
1. Kilang Minyak (Oil Plant)	US\$ 3 Billion ≈ Rp 39 T, untuk 300.000 BOE/D (Sumber: <i>BP Statistics</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Minyak mentah (crude) sebagian impor karena produksi domestik tidak memadai.
2. LNG Plant	US\$ 175 million ≈ Rp 2,3 T untuk 0,25 MTPA (Sumber: <i>Diolah</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat tergantung dari penemuan cadangan gas
3. CNG Plant	US\$ 6 million untuk Mother Station kapasitas 5 MMSCFD dan US\$ 2 million untuk Daughter Station kapasitas 1 MMSCFD atau Total Rp. 104 Milyar (Sumber: <i>Diolah</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Harga pembelian gas tinggi, shg harga jual mahal. • Tidak bersaing kalau diwilayah pemasaran terdapat jaringan pipa gas
4. LPG Plant	US\$ 100 million ≈ Rp 1,3 T untuk feed gas sebesar 20 – 25 MMSCFD (Sumber: <i>Diolah</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat tergantung dari penemuan cadangan gas dengan kandungan C3 dan C4 yang memadai.

POTENSI BISNIS BUMD HILIR MIGAS (Lanjutan 1)

POTENSI BISNIS	ESTIMASI INVESTASI	ISUE-ISUE PENTING SAAT INI
A. PENGOLAHAN		
5. Land Based Storage & Regasification (LBSR)	US\$ 700 Million ≈ Rp 9,1 T untuk kapasitas 3 MTPA (Sumber: <i>Diolah</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan tanah yang memadai pada wilayah target industri/konsumen. • Daya beli industri
6. Gas To Liquid (GTL)	US\$ 400 million ≈ Rp 5,2 T untuk kapasitas 100 MMSCFD (Sumber: <i>Johanes Anton, 2008</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Teknologinya sudah dipatenkan oleh beberapa perusahaan (ie Shell).
B. PENYIMPANAN		
1. Depot Minyak/BBM	n.a	<ul style="list-style-type: none"> • Tender di NOC/Pertamina
2. Depot LPG	n.a	<ul style="list-style-type: none"> • Tender di NOC/Pertamina
3. Depot LNG (Floating Storage & Regasification Unit/FSRU)	US\$ 80 Million ≈ Rp 1,04 T untuk FSRU Jawa Barat (Offshore & Onshore Pipeline, ORF) (Sumber: <i>Diolah</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas FSRU menyewa

POTENSI BISNIS BUMD HILIR MIGAS (Lanjutan 2)

POTENSI BISNIS	ESTIMASI INVESTASI	ISUE-ISUE PENTING SAAT INI
C. PENGANGKUTAN		
1. Minyak/BBM	Disesuaikan dengan sarana angkutan	<ul style="list-style-type: none">• Mengikuti ketentuan dari pemilik minyak/BBM
2. Gas Bumi/NG	Tergantung jarak dan besaran fasilitas pipa	<ul style="list-style-type: none">• Jaminan pasokan gas bumi/NG menjadi faktor penentu
3. LPG	Disesuaikan dengan sarana angkutan	<ul style="list-style-type: none">• Mengikuti ketentuan dari pemilik LPG
4. CNG	Disesuaikan dengan sarana angkutan	<ul style="list-style-type: none">• Mengikuti ketentuan dari pemilik CNG
5. LNG	Disesuaikan dengan sarana angkutan	<ul style="list-style-type: none">• Mengikuti ketentuan dari pemilik LNG
D. PERDAGANGAN/NIAGA		
1. Minyak/BBM	menyesuaikan	<ul style="list-style-type: none">• Alokasi & Harga BBM
2. Gas Bumi (Gas Pipa, CNG)	Tergantung dengan fasilitas yang dibangun	<ul style="list-style-type: none">• Alokasi Gas, Harga Gas, Infrastruktur Gas
3. LNG (Re-Gas, LNG)	Tergantung dengan fasilitas yang dibangun	<ul style="list-style-type: none">• Alokasi gas, Harga Gas, Regulasi Pemerintah

ALUR PEMIKIRAN DAN PEMBAHASAN ;

“KESEMPATAN BERUSAHA DAN INVESTASI DI BISNIS HILIR MIGAS OLEH DAERAH PENGHASIL MIGAS / BUMD”

(1)

- **ALOKASI** Gas
- **PASAR** Gas
- **INFRASTRUKTUR** Gas

(2)

**KESEMPATAN
BERUSAHA
DAN INVESTASI**

(3)

**Dampak +/- ke
Daerah Penghasil
Migas/BUMD**

SUMBER PENDAPATAN DAERAH PENGHASIL MIGAS: HULU & HILIR



HULU MIGAS

A. PEMERINTAH RI

A1. DBH MIGAS (Rp)

(1)

B. KONTRAKTOR

BUMD PI 10%

Laba/PAD (Rp)

(2)

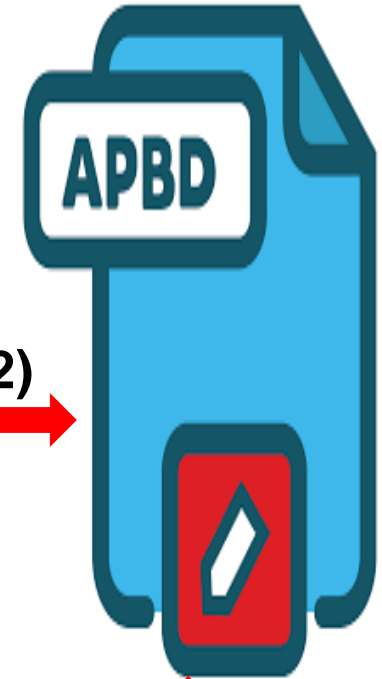
HILIR MIGAS

Alokasi Gas

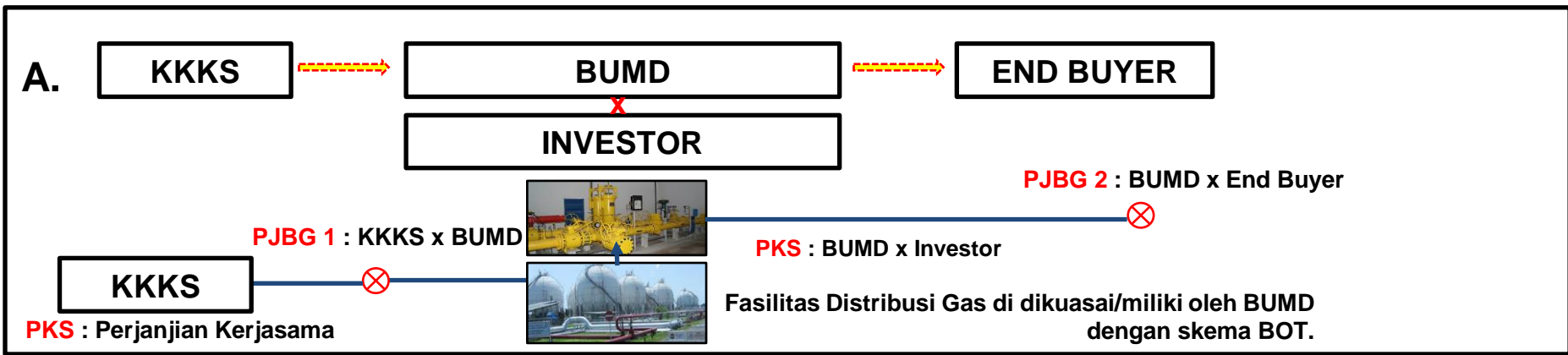
Niaga Gas

Laba/PAD (Rp)

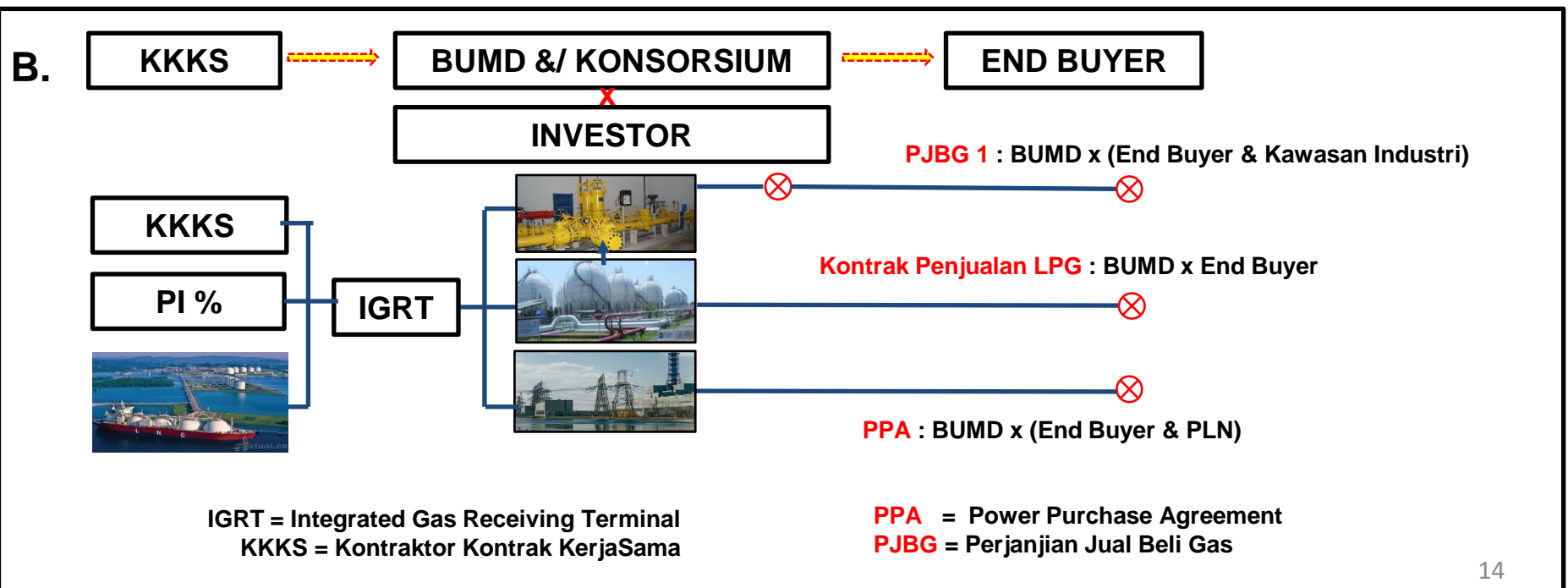
(3)



SKEMA USAHA HILIR MIGAS ; A. MASIH BERTAHAN DAN B. USULAN



PI10% DAPAT DIKONVERSI MENJADI ALOKASI GAS DI BISNIS HILIR MIGAS



Butir – Butir Rekomendasi Penguatan BUMD Hilir Migas ;

- 1. Diperlukan penguatan atau dorongan atas keikutsertaan BUMD dan atau Lembaga yang membina BUMD dalam kaitannya dengan proses legislasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang menyangkut dengan kegiatan Bisnis Migas, target paling cepat adalah PENOLAKAN ATAS RPP GAS BUMI VERSI KEMENPERIN, YANG TIDAK MENYEBUTKAN KETERLIBATAN BUMD UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR GAS BUMI;**
- 2. Terkait butir 1 perlu dilakukan berbagai usaha untuk memastikan Daerah/BUMD mendapatkan alokasi gas dari Produksi Gas Daerah, yakni dengan mengusulkan dan melakukan moratorium semua Ijin Pembangunan Pipa Transmisi atau Distribusi di semua Daerah sampai dengan kepentingan Daerah/BUMD diakomodir, termasuk rencana revisi Permen ESDM No. 37/2016 tentang PI10%, dimana dimungkinkan untuk dikonversikan ke Alokasi Gas, sebagai alternatif solusi apabila PI% tidak dapat diberikan kepada BUMD dengan berbagai alasan;**
- 3. Sinergi antar Pemerintah Daerah/BUMD merupakan satu keharusan dalam kaitannya hadirnya regulasi Migas yang berpihak kepada Daerah. Sehingga investasi kepada SDM yang menelurkan regulasi adalah menjadi tanggung jawab Bersama. Siapa pun Presidennya, Senatornya, Menteri ESDMnya, jiwa dan spiritnya harus berpihak kepada Daerah.**



TERIMA KASIH

Bukhari

**HP/WA: 0812 943 8156 &
bukhari@jpen.co.id**

***“INVESTASI YANG PALING TINGGI ADALAH
INVESTASI PADA MANUSIA”***